

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN TUNJANGAN
HARI RAYA KARYAWAN PABRIK DENGAN SISTEM UTANG
(Studi di PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi Syarat-
syarat Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung

Oleh :

Novita Sari
Npm : 1621030180

Jurusan : Muamalah



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PEMBAYARAN T UNJANGAN
HARI RAYA KARYAWAN PABRIK DENGAN SISTEM UTANG
(Studi di PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi Syarat-
syarat Guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Intan Lampung

Oleh

Novita Sari

Npm : 1621030180

Jurusan : Muamalah

**Pembimbing I
Pembimbing II**

**:Dr. Hj. Zuhraini, S.H.,M.H.
:Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1441H/2020M**

ABSTRAK

Utang piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan diri kepada Allah SWT, dengan berlemah lembut kepada sesama manusia, mengasih dan memberikan kemudahan kepada sesama umatnya, yang semua itu ditunjukkan hanya untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT. PT Sejin Global Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi baju dimana sistem penjualannya akan diekspor keluar negeri. PT. Sejin Global Indonesia setiap tahunnya mengeluarkan tunjangan hari raya atau sering disebut dengan THR, dimana perusahaan membayarkan tunjangan hari raya kepada karyawan dengan sistem utang, hal ini perlu diteliti dengan jelas dan tegas. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengkaji secara mendalam tentang sistem pemabayaran tunjangan hari raya dengan sistem utang di perusahaan PT. Sejin Global Indonesia, adapun rumusan yang akan diteliti adalah bagaimana sistem pelaksanaan pembayaran THR karyawan pabrik dengan sistem utang dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang pembayaran THR karyawan pabrik dengan sistem utang di PT. Sejin Global Indonesia kec. Balaraja Kab. Tangerang, dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembayaran THR karyawan pabrik dengan sistem utang di PT. Sejin Global Indonesia kec. Balaraja Kab. Tangerang dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pembayaran THR karyawan pabrik dengan sistem utang yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif analisis. Tehnik pengumpulan datanya menggunakan metode *interview* dan dokumentasi, sedangkan untuk menganalisis data menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan berfikir deduktif-induktif. Adapun hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran tunjangan hari raya dengan sistem utang yang terjadi di perusahaan PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang dilakukan dengan cara dua kali pembayaran, pembayaran tunjangan hari raya yang pertama dibayarkan sebelum lebaran sejumlah 50% dari gaji dan 50% lagi dibayarkan setelah lebaran. Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran THR karyawan pabrik dengan cara *Qard* di PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang dalam pandangan hukum Islam diperbolehkan, karena pada dasarnya utang piutang yang dilakukan perusahaan PT. Sejin Global Indonesia dimana perusahaan pasti akan membayar tunjangan hari raya dengan lunas kepada karyawan pabrik dan akad *Qard* sendiri dikatagorikan sebagai akad *ta'awuni* (saling tolong menolong). Pembayaran tunjangan hari raya dengan cara *Qard* juga sudah memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi utang piutang, sehingga praktik utang piutang dalam pembayaran tunjangan hari raya dengan cara *Qard* di PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novita Sari

NPM : 1621030180

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran THR Karyawan Pabrik dengan Sistem Utang pada PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung.....

Penulis,

Novita Sari
NPM. 1621030180



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi sebagaimana mestinya terhadap skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Novita Sari

NPM : 1621030180

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran THR
Karyawan Pabrik dengan Sistem Utang (Studi di PT.
Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Pembimbing II

Juhratul Khulwah, M.S.I
NIP. 199107092018012002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran THR Karyawan Pabrik dengan Sistem Utang (Studi di PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang)"**, disusun oleh Novita Sari, Npm: 1621030180, Jurusan Muamalah, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, pada hari dan tanggal: 21 Februari 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag.

Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Penguji III : Juhrotul Khulwah, M.S.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Khairuddin, M.H.

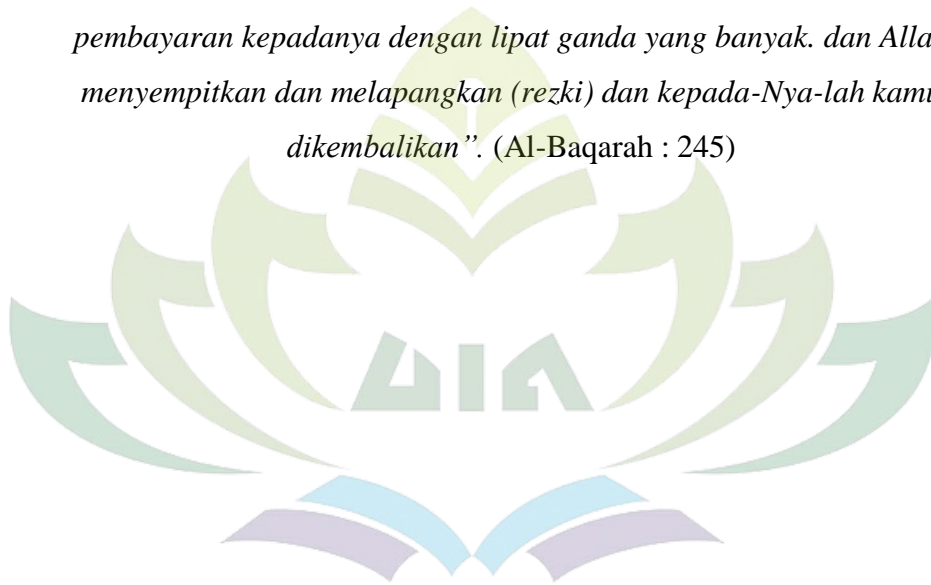
196210221993031002

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artiya: “siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Al-Baqarah : 245)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu meridhoi dan mengabulkan segala Do'a
2. Kedua orang tuaku tercinta, ayah (M. Zikwan) dan ibunda tersayang (Eryani) yang telah bersusah payah membesarkanku, mendidik dan selalu mendoakan untuk keberhasilanku serta Kakak-kakakku dan adikku tercinta Sefti Hertati, Hernan Jaya dan Handika yang selalu memberi semangat mendukung kuliahku
3. Keluarga besarku
4. Sahabat-sahabatku angkatan 2016 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
5. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiku banyak pengalaman yang akan selalu aku kenang.

RIWAYAT HIDUP

Novita Sari lahir pada tanggal 10 Oktober 1995 dilahirkan di Balai Kencana Kec. Krui selatan Kab. Pesisir Barat. Anak ketiga dari empat saudara merupakan buah cinta dari pasangan Bapak M. Zikwan dan Ibu Eryani.

Adapun Riwayat pendidikan:

1. Madrasah Ibtidaiyah Bina Islami Pesisir Barat lulus tahun 2008
2. MTS NU Krui lulus tahun 2011
3. SMAN 1 Pesisir Barat lulus tahun 2014
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung program strata satu (S1) Fakultas Syariah jurusan Muamalah dari tahun 2016 hingga saat ini.

Bandar Lampung,.....

Yang membuat

Novita Sari

Npm: 1621030180

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira penulis panjatkan khadirat Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa kesehatan, Ilmu pengetahuan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran THR Karyawan Pabrik dengan Sistem Utang” (Studi di PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang) dapat diselesaikan. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, semoga kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa dihanturkan banyak terimakasih yang penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Moh Mukri, M. Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. Khairuddin Tahmid, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Ibu Juhrotul Khulwah, M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

4. Ibu Dr. Hj.Zuhraini,S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah khususnya Jurusan Muamalah.
6. Karyawan PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang selaku narasumber dalam penelitian.
7. Bapak dan Ibu selaku Staf karyawan perpustakaan Syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung.
8. Untuk orang tua, dan saudara-saudaraku, terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Allah SWT maha tahu dan akan selalu menolong hamba-Nya yang menolong sesamanya, kebaikan akan dinanti dengan kebaikan.
9. Untuk sahabatku Anisa Fitri, Zirna Wati, Anjela, Meti Mulia, Nurhasian, Novia, Sari Yulia, Nurbawi, Yusuf, Bayu dan Rohmat yang selalu menemani, mengajar, dan menyemangati menengerjakan skripsi ini dan sahabat-sahabatku Jurusan Muamalah angkatan 2016 yang telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas Muamalah D angkatan 2016 yang memberikan semangat dan kebersamaannya.

Penulis menyadari dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan ilmu yang penulis kuasai, untuk itu kiranya pembaca dapat memberikan masukan dan kritik maupun saran-saran, yang bersifat membangun skripsi ini. Mudah-mudahan hasil penelitian skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keIslaman.

Dengan iringan terima kasih peneliti memanjatkan do'a kehadirat Allah SWT. Semoga jerih payah dan amal ibu-ibu dan bapak-bapak serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan khususnya para pembaca pada umumnya. Amiiin

Bandar Lampung.....

Novita Sari

Npm. 1621030180

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengesahan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori.....	17
1. Upah Dalam Islam (<i>Ujrah</i>)	17
a. Pengertian Upah (<i>Ujrah</i>)	17
b. Rukun Dan Syarat Upah (<i>Ujrah</i>)	18
c. Waktu Pembayaran Upah (<i>Ujrah</i>)	21
2. Tunjangan Hari Raya.....	23
a. Pengertian Tunjangan Hari Raya	23
b. Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya.....	25
3. Utang Piutang dalam Islam (<i>Al-Qard</i>)	27
a. Pengertian Utang Piutang (<i>Al-Qard</i>)	27
b. Dasar Hukum Utang Piutang (<i>Al-Qard</i>).....	32
c. Rukun dan Syarat Utang Piutang (<i>Al-Qard</i>)	36
d. Akad Utang Piutang dalam Islam (<i>Al-Qard</i>).....	42
4. Permenaker No.6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan	45
a. Pengertian Tunjangan Hari Raya (THR)	45

b. Hak dan Kewajiban Pekerja atau Buruh	48
c. Syarat Bagi Pekerja Mendapat Tunjangan Hari Raya	52
B. Tinjauan Pustaka	55
BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum PT. Sejin Global Indonesia	59
1. Sejarah PT. Sejin Global Indonesia	59
2. Keadaan Geografis.....	60
3. Keadaan Demografis.....	61
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) PT. Sejin Global Indonesia.....	65
5. Sturuktur organisasi PT. Sejin Global Indonesia.....	78
6. Keadaan Ekonomi Karyawan PT. Sejin Global Indonesia.....	83
B. Praktik Pelaksanaan Pembayaran THR dengan Sistem Utang PT. Sejin Global Indonesia	84
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Sistem Pelaksanaan Pembayaran THR Karyawan Pabrik dengan Sistem Utang	87
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembayaran THR Karyawan Sistem Utang.....	91
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Rekomendasi.....	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

A. Tabel 1

Jumlah Karyawan Gedung 1 PT Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang	51
--	----

B. Tabel 2

Jumlah Karyawan Gedung 2 PT Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang	53
--	----

C. Tabel 3

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kec. Balaraja Kab. Tangerang	54
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal untuk memudahkan dan menghindari kesalahan pemahaman dalam memahami pengertian atau maksud dari skripsi ini dan sebelum melangkah kepada pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu akan dijelaskan tentang arti atau definisi dari istilah-istilah yang terkandung di dalam judul, adapun judul skripsi ini adalah: **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran THR Karyawan Pabrik Dengan Sistem Utang”**, istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan adalah hasil meninjau pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki dan mempelajari dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dibuat oleh Allah SAW untuk mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam baik didunia maupun diakhirat.²
3. Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau karyawan menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang.³

¹Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

³Pengertian Tunjangan Hari Raya”, (On-line), tersedia di: <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-tunjangan-hari-raya.html> (5 April 2019).

4. Karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor, perusahaan, dan sebagainya dengan mendapat gaji atau upah).⁴
5. Utang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang diutangnya dengan jumlah yang sama, tidak kurang atau lebih pada waktu yang ditentukan.⁵

Berdasarkan penjelasan istilah di atas dapat ditegaskan bahwa skripsi ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam tentang pembayaran THR karyawan pabrik dengan sistem utang di PT. Sejin Global Indonesia.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih dan menentukan judul skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengingat perkembangan zaman yang demikian pesat maka persoalan muamalah juga berkembang, sehingga perlu memahami dengan benar sistem bermuamalah pada zaman sekarang ini, lebih spesifikasinya tentang pembayaran THR karyawan pabrik dengan sistem utang.
2. Ditinjau dari aspek bahasan, kajian judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari dalam bidang Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta didukung oleh

⁴ Irham Fahmi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 3.

⁵ A. Khumedi Ja'Far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Lampung: Permatanet, 2015), h.165.

tersedianya data-data dan literatur yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi kali ini.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah Swt. Dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya sehingga segala aktivitas yaitu gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah Swt., seperti yang tertera dalam firman Allah QS.Adz-Dzariyat (56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

”Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. (QS. Adz-Dzariyat : 56)⁶

Berdasarkan ayat ini para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yakni, pertama, *ibadah mahdah* yakni ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan langsung dengan Allah Swt. Atau dikenal dengan *habl min Allah* seperti sholat, puasa, haji. Kedua, *ibadah ghairu mahdah* yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktivitas dengan sesama manusia atau dikenal juga dengan *habl min an-nas*, dalam kajian ini adalah akad-akad dalam muamalah, seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain sebagainya, semua aktivitas semacam ini akan bernilai ibadah di sisi Allah jika dilakukan dengan kejujuran dilandasi

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005) h.417.

dengan unsur rasa tolong menolong sesama manusia dan niat ikhlas karena Allah Swt.⁷

Islam membedakan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Memang masing-masing termasuk dalam pembahasan ekonomi, tetapi keduanya adalah hal yang berbeda sama sekali. Perbedaan ini muncul karena ada dua fakta yang berbeda yaitu:

1. Dalam pengaturan urusan masyarakat dari segi pemenuhan harta kekayaan (*barang dan jasa*) melalui tehnik produksi.
2. Dalam pengaturan urusan masyarakat cara memperoleh, memanfaatkan dan mendistribusikan kekayaan. Pembahasan yang pertama lebih banyak berkaitan dengan kegiatan teknik memperbanyak jumlah barang dan jasa serta bagaimana cara menjaga pengadaannya (*produksi*). Ini lebih tepat dikatagorikan dalam ilmu ekonomi. Pembahasan kedua sama sekali tidak dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya kekayaan, tetapi hanya berhubungan dengan tata kerja (*mekanisme*) pendistribusian. Ini lebih tepat dikatagorikan dalam sistem ekonomi.

Sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem penataan kehidupan masyarakat yang terkait dengan cara pandang atau gagasan tertentu. Jika suatu sistem ekonomi diletakan pada ideologi dari mana sistem itu berasal, maka kenallah apa yang dinamakan sistem ekonomi kapitalisme, sistem ekonomi ilmu ekonomi bersifat universal. Tidak terkait ideologi tetentu. Ia

⁷Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2016), h. 1.

dapat dikembangkan dan diadopsi dari manapun selama tidak kontraproduktif dengan sistem ekonomi yang dianut.⁸

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Dia mengajarkan kepada para pemeluknya untuk senantiasa berbuat adil dan menegakkan keadilan kapanpun dan dimanapun saja mereka bertugas dan berada. Islam dengan lantang menyatakan bahwa tegak dan runtuhnya suatu bangsa adalah tergantung kepada ditegakkan dan tidaknya keadilan dalam hidup dan kehidupan. Dalam Al-Qur'an, Allah menyuruh kepada umat manusia untuk senantiasa berbuat adil demi damainya kehidupan. Firman Allah dalam surat An-Nahl 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (an-Nahl 90).⁹

Manusia adalah makhluk sosial yang pasti memerlukan bantuan dari orang lain, hubungan kedisiplinan dengan kinerja dapat kita lihat dengan proses yang digunakan untuk menghadapi permasalahan kinerja proses kinerja melibatkan manajer dalam mengidentifikasi dan

⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada. 2015), h. 13.

⁹Mawardi Labay El-Sulthani, *Tegakan Keadilan*, (Jakarta:al-mawardi prima, 2002), h. 9.

mengkomunikasikan masalah-masalah kinerja kepada karyawan.¹⁰ Termasuk dalam pembayaran upah memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru disekolah dan lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya maka kewajiban pembayaran upah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Seperti yang tertera pada hadist yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abdilllah bin Umar ia berkata: berkata Rasulullah SAW: Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah No. 2434, Shahih).¹¹

Meningkatkan pengetahuan seorang muslim terhadap berbagai dimensi kehidupan baik urusan dunia atau agama sehingga ia akan mendekatkan diri kepada Allah sang penciptanya, serta meningkatkan kemampuan kompetensinya dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan yang dibebankan kepadanya. Sebagaimana firman Allah Surat Al Mujadalah ayat 11:

¹⁰Irham Fahmi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h.79.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), h. 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُتُوا
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al Mujadalah: 11)¹²

Pemahaman agama sangatlah penting untuk mengetahui kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan menghayati nilai-nilai ajaran agama yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist serta mempraktikkan nilai-nilai ajaran agama Islam tersebut dalam bersikap di kehidupan sehari-hari.¹³

Tidak terkecuali pemahaman terhadap utang. Kegiatan utang-piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan utang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005) h.434.

¹³ Abdullah Zaky, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Citra Persada, 2002), h. 73.

Menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan yang batil dalam setiap perniagaan.¹⁴

Secara umum utang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dan dia akan mengembalikan sama dengan yang dia utangkan. Utang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.¹⁵

PT. Sejin Global Indonesia memproduksi baju yang akan dijual keluar negeri, Realita yang terjadi di lapangan di PT. Sejin Global Indonesia dimana perusahaan mempunyai utang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan, terjadinya perusahaan mempunyai utang kepada karyawan karena karyawan mempunyai utang jam kerja kepada perusahaan sebab utang jam kerja ini

¹⁴Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponogoro, 1995), h. 242.

¹⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37.

dikarenakan sebelum hari raya idhul fitri pekerjaan dilapangan tidak terlalu banyak sehingga karyawan dipulangkan sebelum jam kerjanya habis, jam kerja diperusahaan itu dari jam 07:30-16:30 WIB. Perusahaan membayar utang Tunjangan Hari Raya (THR) karyawan tidak ada kesepakatan yang jelas kapan perusahaan akan membayarnya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang pembayaran tunjangan hari raya karyawan dengan sistem utang antara perusahaan dengan karyawan apakah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memberikan batasan dalam studi dan pengumpulan data, sehingga penelitian ini akan fokus dalam memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian ini suatu informasi dilapangan dapat dipastikan sesuai dengan konteks permasalahannya, sehingga rumusan masalah saling berkaitan dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian pada skripsi ini adalah pelaksanaan pembayaran THR karyawan pabrik dengan sistem utang, yang dilakukan oleh perusahaan PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang. Fokus penelitian yang dihadapi yaitu perusahaan mempunyai utang kepada karyawan pabrik yang berupa pembayaran tunjangan hari raya (THR). PT. Sejin Global Indonesia membayarkan THR karyawan pabrik dengan dua kali pembayaran tidak dengan satu kali pembayaran.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih akurat dan sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pembayaran THR karyawan pabrik dengan sistem utang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pembayaran THR karyawan pabrik dengan sistem utang?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui sistem pelaksanaan pembayaran THR karyawan pabrik dengan sistem utang di PT. Sejin Global Indonesia kec. Balaraja Kab. Tangerang.
 - b. Untuk Mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pembayaran THR karyawan pabrik dengan sistem utang yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

G. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai pembayaran THR karyawan dengan sistem utang dan juga dapat menambah pengetahuan atau keilmuan serta pemikiran ke-Islaman. Selain itu diharapkan menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

kepada para akademisi dalam mengaplikasikan teori-teori yang berhubungan dengan tema penelitian tersebut. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Agar sistematis dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di tengah masyarakat kita dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹⁶ Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data sebanyak-banyaknya sesuai dengan pokok

¹⁶Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 12.

permasalahan yang ada dan menggambarkan secara terbuka sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

2. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan pelaksanaan pembayaran THR karyawan pabrik dengan sistem utang ini dalam ketentuan syariat Islam, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (*observasi*) terhadap gejala yang ada di lokasi kasus penelitian, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini melalui kuesioner atau pertanyaan yang sudah disiapkan. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari pemimpin perusahaan dan karyawan pabrik.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi perpustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi yang digunakan untuk menyebutkan keseluruhan subjek yang akan menjadi sasaran dalam objek penelitian.¹⁷ Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 180 orang sebagai karyawan dan staf tata usaha di PT. Sejin Global Indonesia Kecamatan Balaraja.

b. Sampel

Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian sampel yang digunakan non random sampling yaitu tidak semua individu didalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya teknik non random sampling yang digunakan ini adalah jenis *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok objek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pengambilan sampel adalah bertujuan untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang akan dipecahkan. Sampel dalam penelitian ini adalah 3 orang yang berutang dan 15 orang yang memberi utang di PT. Sejin Global Indonesia.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 173.

Berdasarkan pendapat diatas, kriteria untuk menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Karyawan yang memberi utang kepada perusahaan PT. Sejin Global Indonesia Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang.
- b. Manajer dan marketing perusahaan yang berutang kepada karyawan.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

b. Interview

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab (*interview*) secara langsung kepada objek penelitian yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku-buku, agenda dan lain sebagainya.

5. Pengolahan Data

Data terhimpun atau terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah data agar menjadi sebuah penelitian yang sempurna yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *editing*

Mengoreksi apakah data yang terkumpul atau terhimpun sudah lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian¹⁸. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, observasi, *interview* apakah semua sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.

b. *Coding*

Pemberian tanda pada kata yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan atau kelompok atau klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya.

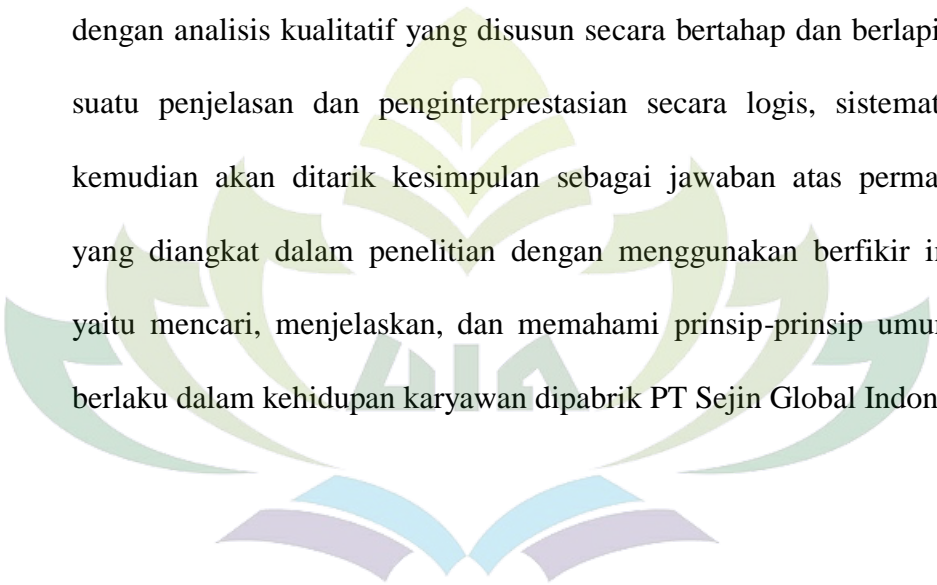
c. Sistematis

Menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini adalah data dikelompokkan secara sistematis, yaitu yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

¹⁸Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.182.

6. Analisis Data

Setelah semua data diperoleh selanjutnya dapat dianalisis. Sedangkan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, tinjauan hukum Islam tentang pembayaran THR karyawan pabrik dengan sistem utang yang mana objek penelitiannya di PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang. Setelah analisis data selesai, maka hasil yang akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif yang disusun secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan menggunakan berfikir induktif, yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan karyawan dipabrik PT Sejin Global Indonesia.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Upah Dalam Islam (*Ujrah*)

a. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atas pengganti. Sedangkan menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat syarat tertentu.¹ Upah dalam bahasa Arab disebut *al-ujrah*. Dari segi bahasa *al-ajru* yang berarti 'iwad (ganti) kata "*al-ujrah*" atau "*al-ajru*" yang menurut bahasa berarti *al-iwad* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.²

Pengertian upah dalam kamus bahasa indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenagakerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

¹A.khumi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.187.

²Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), h.29.

b. Rukun Dan Syarat Upah (*Ujrah*)

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa rukun ijarah hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yaitu penjelasan dari kedua belah pihak yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari ijarah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi ini telah berjalan secara suka sama suka.³ Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:⁴

1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa

menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁵

2. *Shighat* yaitu orang yang melakukan *ijab* dan *qabul* (serah terima)

baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *shighat* atau *ijab qabul*. Jika sudah terjadi *ijab qabul* sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka akad dan kesepakatan

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 216.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : AMZAH, 2010), h.321.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.117.

antara dua pihak sudah terjadi dan setiap pihak terikat dengan hak-hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad.⁶

3. *Ujrah* (upah)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.
- 3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa-menyewanya.⁷

Sebagai sebuah transaksi umum, al-ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara

⁶Oni Sahroni, M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 27-28.

⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.

umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat ijarah adalah sebagai berikut:⁸

a. Pelaku *ijarah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah* tidak sah. Secara umum dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.

b. Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akaditu, maka akadnya tidak sah.

⁸Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

c. Objek *al-ijarah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat.

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

d. Objek *al-ijarah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara'

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh diatas termasuk maksiat.

e. Objek *al-ijarah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja.

c. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan

di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya.

Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang mengharamkan yang haram.⁹ Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, dalam pembayaran upah masyarakat boleh mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah ini bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.¹⁰

Mengenai waktu pembayaran upah sesuai pada perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dalam hal ini upah boleh dibayarkan terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan. Karena pada dasarnya pihak yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayarkan dan tidak

⁹ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2013), h.874.

¹⁰ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunah 13* (Bandung : PT Alma'arif. 1987), h.20.

ditundatunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam.

2. Tunjangan Hari Raya

a. Pengertian Tunjangan Hari Raya

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah Kewajiban bagi Pemerintah dan Pengusaha. Tunjangan ini diberikan karena adanya kebutuhan tambahan sehingga pengeluaran pekerja dan keluarganya menjadi meningkat ketika merayakan Hari Raya Keagamaan. Pemberian Tunjangan ini menjadi suatu kewajiban demi untuk memenuhi kebutuhan kerja. Pembayaran Tunjangan Hari Raya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan Pengusaha setiap menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan.¹¹

Dalam menjalankan pekerjaannya, para pekerja ini berhak atas pendapatan sebagai salah satu bentuk hak yang mereka terima atas kewajiban yang telah mereka jalankan. Setelah melaksanakan kewajiban – kewajiban itu, pekerja dapat meminta apa yang menjadi hak mereka. Selain upah dikenal adanya pendapatan non upah yang diterima oleh pekerja yakni Tunjangan Hari Raya (THR). Tunjangan ini dapat berupa uang ataupun bentuk lain yang diberikan oleh pengusaha pada hari raya keagamaan sesuai yang dianut pekerja. Tunjangan ini merupakan suatu kebutuhan bagi pekerja untuk merayakan hari keagamaan.

Motivasi utama dari seorang pekerja/buruh bekerja di perusahaan adalah

¹¹ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Pasal 7 ayat (3).

mendapatkan nafkah (upah), dan upah merupakan hak bagi pekerja/buruh yang bersifat sensitif. Karenanya tidak jarang pengupahan menimbulkan perselisihan. Pernyataan ini sesungguhnya menyebutkan bahwa pentingnya upah bagi kehidupan pekerja/buruh yang mana dalam sistem pengupahannya haruslah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga dapat tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Upah merupakan bentuk dari suatu imbalan yang diterima oleh pekerja atau buruh pada dasarnya merupakan unsur paling penting dalam meningkatkan produktivitas pekerja atau buruh, selain itu upah juga dapat digunakan oleh pekerja atau buruh untuk memenuhi standar kebutuhan hidup yang dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebutuhan dasar untuk hidup
2. Kebutuhan pendukung kesejahteraan masyarakat
3. Kebutuhan untuk meningkatkan akses terhadap cara berproduksi dan peluang ekonomi dan Kebutuhan untuk hidup dengan rasa aman.

Oleh karena pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) sangat bermanfaat bagi pekerja atau buruh maka perlu sorotan yang lebih tajam dan tinggi terhadap masalah pengupahan. Hal-hal mengenai pengakomodiran aspirasi, penerapan standart upah minimum, serta pengawasan terhadap pelaksanaan upah atau pengupahan minimum merupakan objek-objek yang penting demi terlaksananya pembangunan kualitas kehidupan pekerja yang kelak pasti dapat mendongkrak kinerja pekerja dalam meningkatkan mutu kerja. Tidak jelasnya waktu pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)

terkadang membuat permasalahan yang terjadi semakin kompleks sehingga keadilan untuk kesejahteraan khususnya karyawan menjadi kesulitan karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang terjadi di Lingkungan Perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara. Pada dasarnya Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara memang tidak secara tegas mengaturnya, akan tetapi di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 mewajibkan setiap pekerja yang sudah bekerja selama satu bulan kerja akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR).

b. Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya

Menjelang lebaran, sebagian dari kita pasti mengharapkan tunjangan hari raya atau biasa kita sebut THR. Dan kemudian THR menjadi sebuah keharusan bagi suatu instansi tertentu dan orang – orang yang sudah bekerja pun kadang seperti otomatis diwajibkan memberi THR kepada mereka yang lebih muda dan belum bekerja. THR menjadi sebuah budaya yang menyangkut ekonomi dan kesejahteraan. THR sendiri muncul pada tahun 1994. THR hadir berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/Men/1994 mengenai Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Dengan demikian, mengikuti peraturan tersebut, perusahaan menjadi wajib mengeluarkan THR bagi pegawainya.¹²

¹² Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya” (On-Line), tersedia di: [rihttps://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-thr-dalam-islam](https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-thr-dalam-islam) (26 februari 2020).

Di telaah berdasarkan kajian Islam, menerima THR disamakan seperti menerima hadiah. Dimana hukumnya boleh atau sah – sah saja dikarenakan sudah merupakan hak bagi si penerima.¹³

Menerima THR itu boleh, karena prinsip THR itu seperti gaji, diberikan ketika kinerja kita sudah benar. Yang salah adalah ketika THR diberikan kepada pekerja yang malas atau tidak produktif, serta tidak berkontribusi secara aktif di perusahaannya, namun menuntut THR dengan demo dan lain sebagainya, Islam sendiri menganjurkan bagi para petinggi atau bos memberi upah kepada karyawan sebelum keringat kita kering. THR pun sama, jangan sampai baru diserahkan sehari sebelum Idul Fitri tiba. Namun Substansinya disamakan dengan pemberian gaji, hadiah, dan THR. Pemberian ini bertujuan untuk memacu kinerja semangat para karyawan terhadap apa yang ditanggung jawabkan kepadanya.

Menurut Islam, menerima THR sama saja seperti menerima hadiah yang berarti boleh dan sah-sah saja. Karena hal itu sudah menjadi hak. Menurut Dian Marta Wijayanti, pemerhati pendidikan dan Asesor USAID Prioritas Jawa Tengah mengatakan menerima THR itu hukumnya sama seperti menerima gaji.¹⁴

¹³ *Ibid .*

¹⁴ *Ibid .*

3. Utang Piutang Dalam Islam (*Al-Qard*)

a. Pengertian Utang Piutang (*Al-Qard*)

Al-Qard berasal dari bahasa arab (قرض) artinya meminjamkan uang atas dasar kepercayaan¹⁵. Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah *Al-Qard*, dikatakan demikian karena *Al-Qard* merupakan potongan dari harta *muqridh* (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *Al-Qard*)¹⁶. Riba *Al-Qard* ialah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak terpenuhi kriteria untung muncul bersama risiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*) Transaksi semacam ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu.¹⁷

Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *Al-Qard* secara bahasa sebagai potongan, maksudnya harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut adalah potongan atau bagian dari harta yang memberi pinjaman tersebut.

Menurut Al-Bahuti *Al-Qard* secara terminologi merupakan pembayaran sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya. Ulama secara umum mendefinisikan *Al-Qard* ialah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang

¹⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) , h. 229.

¹⁶Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 151.

¹⁷Adiwarman, Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 5.

terhadap orang lain, pinjaman tersebut merupakan untuk membantu pihak pemimjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. *Al-Qard* dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah kepada pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran dengan tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

Menurut Syar'i *Al-Qard* ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia menerima pengembaliannya sebesar uang tersebut.¹⁹ *Al-Qard* juga bisa diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta dari pemberi pinjaman.²⁰ Dalam literatur fikih klasik, *Al-Qard* dikategorikan dalam *akad tathawwu'i* atau akad saling membantu serta bukan transaksi komersial (transaksi yang melibatkan barang atau jasa dalam pembayaran). Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan utang tanpa mengharapkan imbalan disebut dengan istilah *Al-Qardul Hasan*.

Al-Qardul Hasan merupakan suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman oleh nasabah sebagai penerima baik berupa uang ataupun

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 168.

¹⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.177.

²⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset, 2011), h. 212.

barang tanpa persyaratan adanya tambahan biaya apapun, peminjam atau nasabah berekewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama, menurut Saed *Al-Qardul Hasan* merupakan tujuan untuk memberikan bantuan pinjaman tanpa memaksakan kewajiban tambahan apapun atau beban lainnya.²¹ Toto Abdul Fatah berpendapat *Al-Qardul Hasan* adalah suatu pinjaman yang diberikan seseorang kepada orang lain tanpa dituntut untuk mengembalikan apapun bagi peminjam, kecuali pengembalian modal pinjaman tersebut.²² Sedangkan menurut Umar, *Al-Qardul Hasan* adalah perjanjian pinjaman baru kepada pihak kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yakni sebesar yang dipinjamkan. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan kesepakatan bersama dalam pembayaran dilakukan secara angsuran maupun tunai. Ia menambahkan bahwa *Al-Qardul Hasan* merupakan pinjaman yang harus dikembalikan pada akhir suatu waktu yang telah disepakati tanpa keharusan membayar bunga ataupun pembagian untung rugi dalam bisnis.

Definisi-definisi diatas mempunyai makna yang sama, dengan demikian pengetahuan ini dapat disimpulkan bahwa *Al-Qard* (utang- piutang) adalah pemberian pinjaman oleh kreditur (pemberi pinjaman) kepada pihak lain dengan syarat (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian dengan jumlah

²¹M. Aris Ali Iqbal, *Kekuatan Etitas Syariah yang Terlupakan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h.8.

²²Toto AbduL Fatah, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, (Jawa Barat: MUI, 2001), h. 42.

yang sama ketika pinjaman itu diberikan. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

“siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”.(Q.S. Al-Hadid: 11)²³

Para ulama sepakat bahwa *Al-Qard* boleh dilakukan atas dasar bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan umat-umatnya. Oleh sebab itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan umatnya.

Manusia tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dari umat manusia lainnya, apalagi saat terjatuh dalam berbagai persoalan ekonomi. Terkadang kita harus rela mengambil utang untuk menutupi dan membantu beban tersebut meskipun hanya bersifat sementara dan utang piutanglah yang menjadi pilihan pertama. Islam membolehkan utang piutang tetapi ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan dengan ketentuan sebagai berikut²⁴:

²³Departemen Agama RepublikIndonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005) h.430.

²⁴Hukum Utang Piutang dalam Islam” (On-line), tersedia di: <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-utang-piutang-dalam-islam> (13 Mei 2019)

1. Berutang dengan orang yang Soleh serta menggunakan pinjaman sebaik mungkin
2. Haram apabila berutang dengan niat tidak membayar
3. Berutang dengan keadaan mendesak atau darurat
4. Mengasihi pinjaman dengan ikhlas dengan tujuan untuk membantu
5. Kebaikan sebaiknya dibalas dengan kebaikan
6. Memberi penangguhan waktu dengan yang berutang
7. Menghindari sistem riba
8. Berutang dengan niatan yang baik serta akan melunasinya
9. Utang piutang tidak disertai dengan jual-beli
10. Utang piutang harus ditulis serta dipersaksikan
11. Secepatnya melunasi apabila mendapatkan kelonggaran
12. Memberitahu apabila terjadi keterlambatan untuk membayar.

Utang piutang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat seperti yang sudah dijelaskan diatas, karena utang sesuatu yang sensitif dalam kehidupan manusia. Terkadang kita harus berurusan dengan utang piutang dalam keadaan yang benar-benar sangat terdesak atau darurat.

Utang piutang juga memberikan dampak buruk, terutama jika utang tersebut tidak sempat untuk dilunasi kemudian yang berutang lebih dulu meninggal dunia. Adapun dampak bahayanya berutang:

1. Tertunda masuk surga
2. Menyebabkan setres atau gila
3. Pahala merupakan ganti utangnya

4. Dihukum layaknya seorang pencuri
5. Merusak akhlak.

Allah SWT tidak melarang umatnya yang memberi utang yang hanya dengan jaminan kepercayaan, utang ini dinamakan amanat, karena yang memberi utang telah percaya atau merasa terjamin tanpa menerima barang jaminan dari yang berutang.²⁵ Dengan demikian pembayaran THR dengan sistem utang piutang dibolehkan dalam hukum Islam, karena yang berutang menjamin bahwa utang itu akan dibayar.

b. Dasar Hukum Utang Piutang (*Al-Qard*)

Segala amal perbuatan manusia, tingkah laku, dan tutur kata tidak lepas dari ketentuan ketentuan hukum syari'at, baik hukum syari'at yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dasar hukum *Al-Qard* tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245:



 مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

 وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”(Q.S Al-Baqarah:245)²⁶

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memberi amal Soleh dan memberi infaq fisabilillah dengan harta yang dipinjamkan dengan membalas

²⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 423.

²⁶ Departemen Agama RepublikIndonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005) h.31.

berlipat-lipat ganda kepada pembayar utang. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling tolong membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 2).²⁷

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi perselisihan antara umat sesamanya. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman mereka tentang ketentuan utang piutang yang seharusnya. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ

²⁷ Ibid, h.84.

لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُومُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan

di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. Al-Baqarah: 282)²⁸

Bermuamalah ialah seperti berjual beli, utang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. pemberi utang piutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berutang kaidah fikih menjelaskan, setiap utang yang membawa keuntungan, maka hukumnya riba. Apabila peminjam sedang kesulitan dalam melunasi utangnya sebaiknya dia membicarakan atau penangguhan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo, firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 280)²⁹

Hadist-hadist diatas dapat dipahami bahwa *Al-Qard* merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. Memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan

²⁸ *Ibid*,h.37.

²⁹ *Ibid*.

memberikan sedekah satu kali. *Al-Qard* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

c. Rukun dan Syarat Utang Piutang (*Al-Qard*)

Seperti halnya jual-beli, rukun *Al-Qard* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Menurut Hanafiah, rukun *Al-Qard* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur *fuqaha*, rukun *Al-Qard* adalah:

- a. '*aqid*,
- b. *Ma'qud'alayh*,
- c. *Sihgat*.³⁰

1. Syarat-syarat '*Aqid* (yang berpiutang dan yang berutang)

Untuk '*aqid* baik *muqridh* (yang memberi utang) maupun *muqtaridh* (yang menerima utang) disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tassarruf* atau memiliki *ahliyatul ada*' (kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk bertanggung jawab atas seluruh perbuatannya). Oleh karena itu *Al-Qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqhrid* antara lain:

- a) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru*'
- b) *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalah, seperti *baliqh*, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

³⁰Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.233.

2. Syarat-syarat *Ma'qud'alayh* (barang yang diutangkan)

Objek utang piutang dapat berupa uang atau benda yang mempunyai persamaan untuk sahnya utang piutang tersebut, objeknya harus memenuhi syarat yaitu:

1. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan timbangan, takaran atau jumlahnya.
2. Pinjaman tidak sah dari orang-orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.
3. Sifat pinjaman dan uraiannya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.³¹

3. Syarat-syarat *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Ijab dan *qabul* merupakan unsur-unsur perjanjian utang-piutang. Akad mengandung dua unsur, yaitu *ijab* dan *qabul* yang keduanya dinamakan *sighat*. *Ijab* adalah pernyataan dari pihak yang memberi utang dan *qabul* tidak harus dengan lisan tetapi dapat juga dengan tulisan bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang yang bisu. Perjanjian utang piutang baru terlaksana setelah pihak pertama menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dengan syarat yang diberikan pihak pertama dan pihak kedua telah menerimanya. Setelah perjanjian terjadi sebelum diterima oleh pihak kedua, maka resikonya ditanggung oleh pihak pertama.³²

³¹Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), h.110.

³²Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Muamalat*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h.38.

Menurut Ismail Nawawi rukun utang piutang ada empat, yaitu:

1. Orang yang memberi utang
2. Orang yang berutang
3. Barang yang diutangkan
4. Ucapan *ijab* dan *qabul*.³³

Menurut M. Ali Hasan bahwa rukun utang-piutang itu ada tiga, yaitu:

1. lafaz (*ijab* dan *qabul*)
2. yang berutang dan berpiutang
3. barang yang diutangkan.³⁴

Disamping adanya syarat dan rukun sahnya utang-piutang diatas, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam masalah utang-piutang, yaitu:

- a. Sesuai dengan QS. Surat Al-Baqarah 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita.
- b. Pinjaman dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

³³Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 110.

³⁴Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 307.

d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.³⁵

Disyariatkannya secara tertulis dalam utang-piutang itu, diperlukan dua saksi. Untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan dikemudian hari. Tanpa adanya saksi mungkin yang satu akan mengingkari perjanjian yang telah disepakati bersama. Saksi dalam utang-piutang itu hendaknya terdiri atas dua orang pria *baligh*, muslim, dan bukan budak belian. Sekiranya tidak didapatkan dua orang saksi pria yang memenuhi syarat, hendaknya mengangkat seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang dapat saling mengingatkan diantara keduanya sehingga tidak terjadi kealpaan. Apabila didalam perjanjian utang-piutang tersebut tidak mempunyai penulis atau saksi, maka harus ada barang yang dapat dipegang sebagai ganti adanya saksi dan tulisan. Apabila semua tidak didapatkan, maka boleh tidak memakai saksi, tulisan atau barang jaminan, potongan ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ ضَةً مَّقْبُورَةً
فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.98.

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”. (QS. Al-Baqarah: 283)³⁶

Mengenai pembayaran utang piutang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran utang piutang, dan siapa yang wajib membayarkan, waktu pembayaran, tempat pembayaran dan sesuatu yang dibayarkan.

1. Hak tagihan utang piutang

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak pemberi utang sendiri, atau wakilnya jika dia mewakilkan kepada orang lain atau ahli warisnya sendiri jika dia meninggal dunia.

2. Yang wajib membayar utang piutang

Dalam utang piutang terkait dengan adanya suatu perjanjian, maka pada dasarnya orang yang berutang itulah yang berkewajiban membayar utang piutang tersebut sesuai dengan janjinya apabila jangka waktunya telah habis.

3. Waktu pembayaran utang piutang

Waktu pembayaran utang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan, jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayarannya, maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu untuk membayar utang tersebut. Jika tenggang waktu pembayaran disebutkan dalam perjanjian, maka kewajiban

³⁶Departemen Agama RepublikIndonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , (Bandung: CV Diponegoro, 2005) h.38.

pembayaran utang itu pada waktu yang telah ditentukan, dan pihak berutang pun berhak melakukan tagihan pada waktu tersebut.

Apabila pihak yang berutang belum bisa membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan maka dianjurkan untuk memberikan kelonggaran sampai dia berkelapangan. Apabila pihak yang berutang mempercepat pembayaran sebelum waktunya tiba, kemudian pihak yang memberi piutang membebaskan sebagian sebagai imbalannya, maka menurut jumhur *fuqaha* haram hukumnya.

4. Tempat pembayaran utang-piutang

Ulama fiqih sepakat bahwa utang piutang dibayar ditempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya ditempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, jika tidak ada halangan dijalan, sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar ditempat lain, *muqridh* (pemilik barang) tidak perlu menyerahkannya.³⁷

5. Sesuatu yang diabayarkan dalam utang piutang

Pembayaran utang itu seharusnya dilakukan dengan membayarkan sesuatu yang sejenis dengan utang piutang. Jika utang itu berupa barang tertentu, maka pembayaran harus berupa barang yang sejenis dengan utangnya meskipun barang tersebut mengalami perubahan harga.

³⁷Racmat Syafie'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h.156.

d. Akad Utang Piutang dalam Islam (*Al-Qard*)

Akad *Al-Qard* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁸

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Al-Qard*, yaitu:

1. Akad *Al-Qard* dilakukan dengan *sigat ijab* dan *qabul* atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, *muatah* (akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti),
2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh, dan tanpa paksaan), maka akad *Al-Qard* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
3. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padananya dipasaran, atau padanan nilainya, sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *Al-Qard* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan.
4. Ukuran jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *Al-Qard*.³⁹

³⁸Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 55.

Az-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *Al-Qard*, yaitu:

1. Tidak mendapatkan keuntungan jika keuntungan tersebut untuk pemilik barang atau pemberi pinjaman (*muqridh*). Maka para ulama sudah bersepakat bahwa dia tidak diperbolehkan, karena ada larangan dari syariat dan sudah keluar dari jalur kebijakan, jika untuk peminjam (*muqridh*) maka diperbolehkan. Jika untuk mereka berdua tidak diperbolehkan kecuali sangat dibutuhkan.
2. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual-beli dan lain sebagainya, jika hadiah dari pihak peminjam (*muqtaridh*), maka menurut malikiyah tidak boleh diterima oleh pemilik barang atau pemberi pinjaman (*muqtaridh*) karena mengarah pada tambahan atas pengunduran, sebagaimana diperbolehkan jika antara *muqridh* dan *muqtaridh* ada hubungan yang menjadi faktor pemberian hadiah dan bukan karena utang tersebut.⁴⁰

Pasal 621 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *Qardh* pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu mengembalikan. Ketentuan lain adalah pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *Qardh*, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam, Hal ini diperlukan

³⁹M. Aris Ali Iqbal, *Kekuatan Entitas Syariah yang Terlupakan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 172.

⁴⁰*Ibid.*

untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *Qardh*.⁴¹ sebagaimana terdapat pada QS. An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa' ayat 29).⁴²

Al-Qard merupakan kebijakan yang membawa kemudahan kepada muslim yang mengalami kesulitan dan membantunya dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan, mengutang tidaklah terhitung sebagai bentuk meminta-minta yang makruh, karena Rasulullah sendiri pernah berutang kepada orang lain. Disyaratkan untuk sahnya pemberian utang ini bahwa pemberi utang adalah orang yang boleh mengeluarkan sedekah. Maka, seorang wali (pengasuh) anak yatim tidak boleh memberikan utang dari harta anak yang dia asuh tersebut. Disyariatkan juga diketahuinya jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, piutang tersebut menjadi utang tangan orang

⁴¹ *Ibid*, h.173.

⁴² Departemen Agama RepublikIndonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005) h.65.

yang meminjam, dan dia wajib mengembalikannya ketika mampu dengan tanpa menunda-nundanya.⁴³

Berbagai syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan diatas harus dipenuhi saat akad *Qardh*. Sah atau tidaknya suatu akad tergantung terpenuhi rukun, syarat, dan ketentuan yang berlaku.

2. Permenaker No.6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan

a. Pengertian Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau karyawan menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang.⁴⁴ Hari raya keagamaan adalah hari raya idul fitri bagi pekerja atau buruh yang beragama Islam, hari raya natal bagi pekerja atau buruh yang beragama kristen katolik dan kristen protestan, hari raya nyepi bagi pekerja atau buruh yang beragama hindu, hari raya waisak bagi pekerja atau buruh yang beragama budha, hari raya imlek bagi pekerja atau buruh yang beragama konghucu.⁴⁵ Didalam masyarakat berkembang empat istilah yang kadang-kadang dikacaukan penggunaanya, yaitu buruh, pekerja, karyawan dan pegawai. Kekacauan penggunaan keempat istilah tersebut disebabkan beberapa faktor yang berkembang dalam masyarakat. Istilah

⁴³Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 411.

⁴⁴Pengertian Tunjangan Hari Raya”, (On-line), tersedia di: <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-tunjangan-hari-raya.html> (5 April 2019).

⁴⁵Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Pasal 7 ayat (3).

buruh misalnya, jarang digunakan karena buruh selalu dihubungkan dengan pekerjaan kasar, pendidikan rendah dan penghasilan rendah pula. Oleh karena itu, seseorang yang bekerja diperusakaan bank tidak pernah menyebut dirinya buruh perusahaan bank, tetapi karyawan perusahaan bank atau perusahaan.⁴⁶

Tunjangan Hari Raya (THR) adalah kewajiban bagi pemerintah dan pengusaha. Tunjangan ini diberikan karena adanya kebutuhan tambahan sehingga pengeluaran pekerja dan keluarganya menjadi meningkat ketika merayakan Hari Raya Keagamaan. Pemberian tunjangan ini menjadi suatu kewajiban demi untuk memenuhi kebutuhan kerja. Pembayaran Tunjangan Hari Raya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan pengusaha setiap menjelang perayaan Hari raya Keagamaan.

Tunjangan Hari Raya terdapat 2 (dua) subyek saling mempunyai kepentingan didalamnya, yakni:

1. Pengusaha

Pengusaha sebagai subyek pemberi Tunjangan Hari Raya, pengusaha memiliki kepentingan dalam pemenuhan kewajiban sebagai pemberi Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan Permenaker No. 6 Tahun 2016 dimana perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada diindonesia yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri dan/atau perusahaan bukan miliknya.

⁴⁶Abdul Racmad Budiono, *Hukum Pemburuan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997), h. 1.

2. Pekerja

Pekerja sebagai subyek penerima Tunjangan Hari Raya karena tunjangan tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerja yang telah mereka lakukan. Pengusaha wajib memberikan tunjangan Hari Raya kepada setiap pekerja setiap satu tahun sekali selama setahun.

Besarnya jumlah Tunjangan Hari Raya telah ditetapkan Permenaker No. 6 Tahun 2016 besar tunjangan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:⁴⁷

- a. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR 1 bulan upah.
- b. Pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan per hitungan:

Dirumuskan: $\frac{\text{Masa kerja}}{12} \times 1$ (satu) bulan upah

12

Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan upah satu bulan adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap. Tunjangan Hari Raya dapat diberikan dengan jumlah yang lebih besar melebihi ketentuan nilai Tunjangan Hari Raya yang telah ditetapkan menurut Pasal 3 ayat (1) Pemenaker Nomor 6 tahun 2016

⁴⁷ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Pasal 7 ayat (3).

sehingga tidak terpaku pada jumlah upah pokok ditambah dengan Tunjangan tetap yang diterima secara rutin oleh para pekerja. Namun besarnya jumlah tersebut harus menurut kesepakatan kerja, atau kebiasaan yang ada. Besarnya nilai Tunjangan Hari Raya yang ditentukan melalui Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 ini merupakan ketentuan minimal, yang artinya bahwa pengusaha tidak boleh memberikan Tunjangan Hari Raya yang nilainya dibawah ketentuan minimal tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Pekerja atau Buruh

Pekerja atau buruh berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan. Untuk itu tenaga kerja harus diberdayakan supaya mereka memiliki nilai lebih, dalam arti lebih mampu, lebih trampil dan lebih berkualitas agar dapat berdayaguna optimal dalam pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam Era Globalisasi.

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah (pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Upah dapat didefinisikan sebagai sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian, dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewajiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang

telah disumbangkannya dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya.⁴⁸ Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang berbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945.⁴⁹ Mengenai hubungan kerja Iman Soepomo menyatakan bahwa pada dasarnya hubungan kerja, yaitu “suatu hubungan antara buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah”. Jadi, intinya sama saja dengan perumusan hubungan kerja dalam UU No. 13 tahun 2003, yaitu hubungan kerja akan ada setelah dibuatnya suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja dalam pasal 1601 a KUH Perdata disebut dengan persetujuan pemburhan, yaitu: “persetujuan dengan mana pihak yang satu si buruh mengikatkan dirinya untuk dibawah perintahnya pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.⁵⁰ Pasal 1 huruf 14 UU No. 13 Tahun 2003 menentukan, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-

⁴⁸M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2 (Januari 2017), h. 484.

⁴⁹Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 2.

⁵⁰*Ibid*, h.3.

syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, semetara itu, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari beberapa perumusan perjanjian kerja yang melahirkan hubungan kerja tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian kerja adalah: (1) adanya pekerja, (2) adanya perintah/petunjuk dari pengusaha, (3) adanya upah. Unsur-unsur perjanjian kerja ini dalam UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 huruf 15 dipergunakan sebagai unsur-unsur hubungan kerja.⁵¹

1. Adanya pekerja

Dalam suatu perjanjian kerja, pekerjaan merupakan unsur yang terpenting karena pekerjaan merupakan prestasi yang diperjanjikan oleh pekerja atau buruh. Tanpa adanya pekerjaan, perjanjian itu bukanlah perjanjian kerja.

2. Adanya perintah atau petunjuk dari pengusaha

Perintah atau petunjuk dari pengusaha juga merupakan unsur yang utama dalam suatu hubungan kerja karena dengan adanya unsur perintah atau petunjuk dari pengusaha inilah, suatu “hubungan” itu dapat dikategorikan suatu hubungan kerja.

Dalam suatu hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha berwenang memberikan perintah atau petunjuk-petunjuk kepada para pekerja atau buruhnya tentang bagaimana

⁵¹ *ibid*, h. 5.

pekerja itu harus dilakukan. Dengan demikian hubungan subordinasi, hubungan antara atasan dengan bawahan.

3. Adanya upah

Adapun yang dimaksud dengan upah menurut pasal 1 angka 30 UU No. 13 Tahun 2003 yaitu, hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dengan membayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kemampuan, keterampilan dan keahlian tenaga kerja perlu terus menerus ditingkatkan melalui perencanaan dan progja ketenagakerjaan termasuk pelatihan, pemagangan dan pelayanan penempatan tenaga kerja. Sebagai salah satu aspek dari pembangunan, tanaga kerja perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek. Termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan didalam dan diluar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan pekerja serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman, tentram, terpenuhi keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin serasi, dan seimbang.

Hak dan kewajiban pekerja atau buruh merupakan hal berpikir atau bertindak dan pasti timbul dalam hubungan ketenagakerjaan karena hak dan kewajiban yang lahir dari aktivitas produksi yang melibatkan pekerja atau buruh dan pengusaha atau bajikan. Hak dan kewajiban merupakan hal yang sangat erat hubungannya.

c. Syarat bagi Pekerja Mendapatkan Tunjangan Hari Raya

Tunjangan Hari Raya yang diberikan oleh pemerintah dan pengusaha tidak lepas dari faktor pekerja yang menerimanya. Pekerja disini ialah sebagai tenaga kerja yang bekerja kepada pengusaha sehingga berhak atas imbalan yang ada. Pengusaha wajib membayar Tunjangan Hari Raya kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang ada sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan hak-hak pekerja sangat penting dalam kehidupan industry Indonesia yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia dan UUD Tahun 1945 sebagai asar hukum konstitusi Indonesia. Hukum sebagai panglima dan sifat hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, maka dimunculkannya aturan tentang ketenagakerjaan, aturan tersebut berupa Undang-Undang ketenagakerjaan yang meliputi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Kerja Sosial Tenagakerja, Undang-Undang No.

2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industri, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh dan Peraturan Pemerintah maupun keputusan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.⁵²

Sering dikemukakan dalam berbagai tulisan penyusunan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan, pekerja atau buruh merupakan aset yang sangat besar dan penting artinya, karena pekerja atau buruh merupakan “tulang punggung” dari perusahaan yang menentukan berhasil atau tidaknya pengusaha tersebut dalam menunjang pembangunan nasional oleh karena itu, wajar apabila kepada pekerja atau buruh diberikan perlindungan yang layak guna meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, dan kenyamanannya dalam pekerja perlindungan ini secara umum mencakup sebagai berikut:

- a. Norma keselamatan kerja, yang meliputi perlindungan-perlindungan guna menjamin keselamatan pekerja atau buruh atas pekerjaan yang dilakukan terutama pertalian dengan mesin, pesawat, alat-alat kerja, bahan dan proses pengerjaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan.
- b. Norma keselamatan kerja dan *higiene* perusahaan, pada umumnya meliputi: pemeliharaan dan mempertinggi derajat kesehatan

⁵²Darwis Anatami, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja *Outsourcing* Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 No. 2 (Desember 2016), h. 209-210.

pekerja atau buruh, dilakukan dengan mengatur pemberian obat-obatan, perawatan tenaga kerja yang sakit.

- c. Norma kerja yang meliputi, perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang berkaitan dengan waktu kerja, sistem pengupahan, istirahat, cuti kerja wanita, anak, kesusilaan, ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing yang diakui oleh pemerintah, kewajiban sosial kemasyarakatan dan lainnya guna memelihara kegairahan dan moril kerja yang tinggi serta menjaga perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral.
- d. Kepada pekerja atau buruh yang mendapat kecelakaan atau menderita penyakit kuman akibat pekerjaan, berhak atas ganti rugi perawatan dan rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat pekerjaan, ahli warisnya berhak mendapat ganti ruginya.⁵³

Salah satu hak yang melekat pada hakikat pekerja atau buruh adalah hak mendapatkan Tunjangan Hari Raya salah satu tujuannya adalah demi kesejahteraan pekerja. Sehingga peran pekerja dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya juga sangat penting. Peran pekerja dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya adalah sebagai subyek penerima Tunjangan Hari Raya. Tunjangan Hari Raya tidak serta merta diberikan begitu saja kepada pekerja atau buruh. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dahulu oleh pekerja untuk dapat menerima Tunjangan Hari Raya. Sebelum berlakunya Permenaker No.6 Tahun 2016 Tentang

⁵³Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h. 18-19.

Tunjangan Hari Raya yang berlaku adalah Permenaker No.4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerjaan perusahaan. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa pekerja yang berhak memperoleh Tunjangan Hari Raya adalah pekerja yang mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan secara terus menerus atau lebih. Hal ini dikuatkan dengan adanya pasal 3 Permenaker Nomor 4 Tahun 1994 bahwa besarnya Tunjangan Hari Raya yang diterima oleh pekerja disesuaikan dengan masa kerja yang telah dijalani oleh pekerja yang bersangkutan dengan perhitungan (masa kerja: 12 x 1 bulan upah(gaji pokok + tunjangan tetap). Dari hal-hal diatas, dapat disimpulkan bahwa kewajiban pengusaha tidak hanya membayar THR tanpa melihat hal-hal yang berkaitan dengan pekerja maupun THR itu sendiri. Pengusaha harus tetap memperhatikan besarnya batas minimum jumlah THR yang berkaitan dengan besarnya upah minimum regional tiap-tiap daerah. Selain itu, pengusaha juga mengemban kewajiban untuk membayarkan THR bagi pekerjanya yang berstatus pekerja waktu tidak tertentu ter-PHK sejak 30 hari sebelum jatuh tempo THR keagamaan serta pengusaha wajib memenuhi kewajibannya untuk membayar THR kepada pekerja yang dipindahkan deperusahaan lain dengan ketentuan masa kerja berlanjut.

d. Tinjauan Pustaka

1. Berdasarkan hasil penelitian oleh Annisa Apriyani (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tetang Utang Piutang dengan Jaminan Kartu

ATM” Studi Kasus Warga Perumahan Kopkar Dwi Karya Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung tengah. Hasil penelitian ini pelaksanaan jeminan (*ar-rahn*) pada warga perumahan Kopkar Dwi Karya yaitu debitur melakukan peminjaman dengan jumlah uang tertentu dengan membawa kartu atm sebagai jaminannya, lalu pihak debitur memberitahu pin atau kata sandi dari kartu atm tersebut kepada pihak di kreditur. Dalam kegiatan bermuamalah kegiatan ini diperbolehkan karena kesepakatan yang dilakukan antar kedua belah pihak sesuai dengan akad sebelumnya dan tidak merugikan antar pihak yang terlibat dalam kegiatan ini.⁵⁴

2. Berdasarkan hasil penelitian oleh Hasbi (2017) dengan judul “Praktik Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam” di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa utang piutang di Kecamatan binuang Kabupaten Polewali Mandar dilihat dari sisi pola utang piutang yang dimana utang piutang berdasarkan jaminan tidak sesuai dengan hukum syar’i dan pola utang piutang tanpa jaminan sesuai dengan hukum syar’i. Adapun faktor pendorong masyarakat melakukan utang piutang yaitu karena adanya faktor kemudahan, kebutuhan, ekonomi dan pendidikan.⁵⁵

⁵⁴Apriyani Annisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang piutang dengan Jaminan Kartu ATM di Perumahan Kopkar DWI Karya Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah”. (*Skripsi* Program Sarjana Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Februari 2017), h. 62.

⁵⁵Hasbi, “Praktik Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”. (*Skripsi* Program Sarjana Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar, Maret 2017), h. 62.

3. Berdasarkan hasil penelitian oleh Yunita Astuti (2018) dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Gabah dengan Tambahan Sedekah” di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Gerger Kabupaten Madiun. Hasil penelitian ini utang piutang gabah dengan tambahan sedekah di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Gerger Kabupaten Madiun terjadi ketika seorang penerima utang datang kepada pemberi utang untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak tersebut mengadakan ijab qabul secara lisan dan tulisan. Dalam hal ini, kedua belah pihak saling mengetahui bahwa setiap bagian gabah yang diutangkan kepada penerima utang akan dikembalikan dengan penambahan minimal 5 Kg gabah atau kelipatannya jika tidak dapat membayar saat jatuh tempo sebagai sedekah sesuai kesepakatan umum yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dan sistem utang piutang seperti itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam karena meskipun kedua belah pihak melakukan transaksi tersebut atas suka sama suka, namun didalamnya terdapat unsur Riba yang diharamkan oleh hukum Islam, sesuai dengan kaidah hukum Islam “setiap pinjaman atau utang piutang yang mengalirkan atau mensyaratkan adanya kelebihan dalam pengambilannya, maka termasuk kategori Riba”.⁵⁶

Dari ketiga penelitian diatas, terdapat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, persamaan penelitian

⁵⁶Astuti Yunita “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Gabah dengan Tambahan Sedekah” di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Gerger Kabupaten Madiun. (*Skripsi* Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Juli 2018), h. 5.

diatas dengan sekarang hanya sama-sama melakukan transaksi utang-piutang dengan memakai metode yang sama. Sedangkan yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian sekarang adalah subjek penelitian dan penelitian diatas sistem utang-piutangnya dengan mengadakan jaminan barang dan mengadakan tambahan saat melakukan transaksi utang piutang, disini sudah jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu sangatlah berbeda.

Adapun penelitian dalam skripsi penulis berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran THR Karyawan dengan Sistem utang, di PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang, di dalamnya membahas tentang sistem perusahaan PT. Sejin Global Indonesia membayar tunjangan hari raya dengan sistem dua kali pembayaran, pembayaran pertama dilakukan 7 hari sebelum lebaran atau sebelum karyawan diliburkan menjelang lebaran dan pembayaran kedua dilakukan setelah lebaran atau karyawan sudah mulai masuk kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Anwar, Syamsul, *Hukum perjanjian syariah*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ashadie Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerjaan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Basyir Azhar Ahmad, *Azas-Azas Hukum muamalat*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Budiono Racmad Abdul, *Hukum Pemburuan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Depatemen Agama RepublikIndonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnnnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2005.
- El-Sulthani, Labay Mawardi, *Tegakan Keadilan*, Jakarta: al-mawardi prima, 2002.
- Fatah Abdul Toto, *Bank Tidak Identik Dengan Riba*, Jawa Barat MUI, 2001.
- Fahmi, Irham, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Hamid, *Peraturan Pekerja Buruh*, Jakarta: Darurat Bahagia, 2004.
- Ismail, *perbankan syariah*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Offset, 2011.
- Iqbal Ali M. Aris, *Kekuatan Etitas Syariah yang Terlupakan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.

Ja'far, Khumedi.A, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Lampung: Permatanet, 2015.

Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.

Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Nadadap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permataaksara, 2016.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Rasid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Sahroni Oni, Adiwarmar, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, cet. Ke-1 Bandung: PT. Alma'arif, 1987.

Syafie'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.

Sutedi Andrian, *Hukum Pemburuan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Sunarjo Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Pasal 7 ayat (3).

Pena Tim Prima, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press, 2015.

Wasiat Ria, “Standar Operasional Prosedur” . (Dekumen yang berisikan *Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan*, yang diselenggarakan oleh PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 2016.

Wasiat Ria, “Struktur Organisasi” . (Dekumen yang berisikan *Nama Karyawan yang Memiliki Jabatan Tinggi*, yang diselenggarakan oleh PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 2016.

Ya’kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponogoro, 1995.

Zaky, Abdullah, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Citra Persada, 2002.

Jurnal

Anatami, Darwis, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Outsourcing Menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 dan Hukum Islam, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 13 No. 2 , Desember 2016.

Annisa, Apriyani, Tinjauan Hukum Islam Tentang Utang piutang dengan Jaminan Kartu ATM di Perumahan Kopkar DWI Karya Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. *Skripsi* Program Sarjana Muamalah UIN Raden Intan Lampung, Februari 2017.

Hasbi, Praktik Utang Piutang dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, *Skripsi* Program Sarjana Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar, Maret 2017.

Sumanto Ahmad , Muzakki M Harir, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 14 No. 2, Januari 2017.

Yunita, Astuti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Gabah dengan Tambahan Sedekah” di Masjid Baitus Syarfan Desa Purworejo Kecamatan Gerger Kabupaten Madiun, *Skripsi* Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Juli 2018.

Wawancara

Aam, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 25 Mei 2019.

Ade Syahrizal, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 24 Mei 2019.

Agus, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 26 Mei 2019.

Aryati, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 22 Mei 2019.

Ani, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 23 Mei 2019.

Dudi, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 24 Mei 2019.

Eka, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 22 Mei 2019.

Intan, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 24 Mei 2019.

Jimmy, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 22 Mei 2019.

Kasmi, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 25 Mei 2019.

Nuryati, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 23 Mei 2019.

Musluhah, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 27 Mei 2019.

Sunengsih, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 23 Mei 2019.

Sukesih, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 27 Mei 2019.

Sri Muryani, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 27 Mei 2019.

Titik Sapitri, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 23 Mei 2019.

Tasmila, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 22 Mei 2019.

Yupita, wawancara dengan Penulis , PT. Sejin Global Indonesia, Tangerang, 23 Mei 2019.

Website

Hukum Utang Piutang dalam Islam” (On-line), tersedia di:
<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-hutang-piutang-dalam-islam>
(13 Mei 2019).

Jam Kerja” (On-Line), Tersedia di:
<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/jam-kerja> (10 Juli 2019).

Kepabeanan” (On-Line), Tersedia di:
<https://w3cargo.com/kepabeanan-dan-bea-cukai/> (10 Juli 2019).

Jam Kerja” (On-Line), Tersedia di:
<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kompensasi/jam-kerja> (10 Juli 2019)

Pengertian Tunjangan Hari Raya”, (On-line), tersedia di:
<http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-tunjangan-hari-raya.html> (5 April 2019).